

## NOTA KESEPAHAMAN

antara

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**  
Berkedudukan di Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  
**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

dengan

**WALIKOTA MAKASSAR**  
Berkedudukan di Makassar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  
**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

**Nomor : 8 Tahun 2019**

**Nomor : 180.027/016/BPKS/IV/2019**

Sepakat mengadakan kerja sama di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang meliputi:

1. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
2. Sosialisasi dan penyebarluasan kegiatan melalui media publikasi serta seminar, konferensi, simposium, atau lokakarya;
3. Konsultasi, pendampingan dan bimbingan teknis di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
4. Penyediaan, pemanfaatan serta pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing;
5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara pejabat setingkat eselon I atau eselon II di lingkungan kerja **PARA PIHAK**.

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani di Jakarta, pada tanggal Delapan bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas ( 08 – 04 – 2019 ).

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH**

**WALIKOTA MAKASSAR**

ttd

ttd

**Dr. Ir. RONI DWI SUSANTO, M.Si.**

**Ir. H. MOH. RAMDHAN POMANTO**